

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Daya serap anggaran masih menjadi isu yang besar dalam pengelolaan keuangan baik Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Pusat. Pengelolaan keuangan negara merupakan keseluruhan kegiatan pejabat pengelola keuangan negara sesuai dengan kedudukan dan kewenangannya yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban. Dalam mewujudkan pengelolaan keuangan yang akuntabel, diperlukan penerapan penganggaran berbasis kinerja (performance based budgeting) dimana sistem ini menggunakan kinerja sebagai tolok ukurnya dengan memperhatikan keterkaitan antara anggaran dan hasil (kinerja). Wujud riil dari pengelolaan keuangan negara adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dijabarkan ke dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) sebagai pedoman pelaksanaan anggaran dari masing-masing Kementerian/Lembaga. Dalam sistem ketatanegaraan, anggaran merupakan motor penggerak yang digunakan sebagai landasan pengeluaran dan penerimaan oleh pemerintah untuk menjalankan roda pemerintahan (Ali Rozai & Subagiyo, 2015). Lebih lanjut, dalam konteks pembangunan ekonomi, pembelanjaan anggaran akan memicu/ mengaktifkan sektor riil untuk berkembang sebagai bentuk dari multiplier effects yang pada akhirnya akan berpengaruh kepada pertumbuhan ekonomi secara makro.

Selama ini terjadi perdebatan sengit diantara para ahli untuk mengukur kinerja sektor publik (Radnor & McGuire, 2004). Pemerintah masih menggunakan realisasi penyerapan anggaran sebagai salah satu indikator keberhasilan instansi pemerintah pusat maupun daerah dalam pengelolaan keuangan negara. Hal ini biasa terjadi di negara berkembang dimana indikator kinerja cenderung fokus terhadap kuantitas (Ni Putu S.H. Mimba, 2007) Seperti misalnya di Indonesia, (Puspasari, n.d.) merilis berita bahwa penghargaan pada Kementerian/Lembaga dengan kinerja anggaran terbaik dalam rakornas pelaksanaan anggaran tahun 2022. Penilaian atas

capaian pelaksanaan anggaran dilakukan atas dasar 11 (sebelas) indikator yang merupakan penjabaran dari evaluasi aspek kesesuaian, aspek kepatuhan terhadap regulasi dan aspek efisiensi kegiatan.

Untuk menilai kualitas kinerja pada pelayanan publik Pemerintah juga, terdapat beberapa faktor utama yang perlu dipertimbangkan, seperti: a) elemen input (masukan), yang mencakup ketersediaan sumber daya manusia, anggaran, sarana, dan prasarana, b) tahapan aktivitas, termasuk birokrasi dan disiplin kerja, serta c) hasil output (keluaran), yang merupakan hasil langsung dari suatu proses atau pencapaian target program. Faktanya yang terjadi adalah output yang dihasilkan dari kinerja Pemerintahan masih dirasa kurang oleh masyarakat. Pengelolaan anggaran yang kurang transparan dan tidak sesuai dengan fasilitas yang diterima masyarakat menjadi isu yang telah lama membentuk citra negatif pada sektor pelayanan publik. Bahkan pada pelayanan publik di daerah Depok menurut (Amelinda Alda et al., 2022) dari tahun 2015 hingga tahun 2018 terjadi ketidak efektifan penyerapan anggaran. Adapula kasus terkait proses pengadaan barang/jasa anggaran pembelanjaan daerah yang dilakukan Pemerintah Lampung masih secara tradisional, (Purwosusilo, 2014: 33). Namun dalam praktiknya, (Agung Djojosoekarto (ed), 2008, 44) menyimpulkan bahwa sering terjadi penyimpangan terhadap prinsip-prinsip dan ketentuan pengadaan barang/jasa pemerintah tersebut yang diatur dalam KEPRES 80 tahun 2003. Penyimpangan tersebut mencakup aspek administratif dan tindakan korupsi yang merugikan keuangan negara. Sayd et.al (2016) menyatakan bahwa evaluasi anggaran melibatkan tiga aspek utama, yaitu: (1) pelaksanaan anggaran, (2) total anggaran, dan (3) perencanaan anggaran. Meskipun terdapat peningkatan tahunan dalam alokasi anggaran, implementasinya di lapangan masih terhambat, menyebabkan surplus anggaran dikembalikan ke kas negara. Kendala dalam penyusunan anggaran sering terjadi karena keterbatasan akses internet dan kurangnya sumber daya manusia di bidang keuangan.

Laporan hasil pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI perwakilan Lampung menemukan kebocoran anggaran sebesar Rp5,1

miliar. temuan itu merupakan hasil pemeriksaan BPK terhadap kegiatan-kegiatan fisik di Dinas PU, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, serta Dinas Koperasi dan UMKM. Telah melakukan langkah-langkah menindaklanjuti LHP. Progres penanganan temuan itu sudah 75 persen (Robi Suliska Sobri, 2022). Sehingga, jika di akhir tahun masih terdapat sisa anggaran tetapi output telah tercapai, maka hal itu bukanlah suatu kegagalan. Untuk menguatkan kembali komitmen mewujudkan transparansi dan akuntabilitas (Sri Mulyani, 2022) pengelolaan keuangan negara melalui pertanggungjawaban APBN/APBD, Kementerian Keuangan menyelenggarakan Rapat Kerja Nasional Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Tahun 2022 dengan tema Mengawal Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja untuk Pulih Lebih Cepat, Bangkit Lebih Kuat.

Tingkat penyerapan berdasarkan pencatatan-pencatatan akuntansi masih merupakan alat kendali awal tinggi rendahnya kinerja suatu organisasi (Otley, 1978). Sehingga, serapan anggaran yang tinggi tidak seharusnya menjadi indikator utama yang digunakan untuk menilai baik atau tidaknya kelembagaan keuangan. Seperti yang diungkapkan oleh Radnor dan McGuire (2004) yang menyatakan bahwa pengukuran kinerja bukan hanya merupakan pengukuran data-data yang tersaji namun harusnya merupakan pemahaman hubungan mengenai strategi, sumber daya manusia, struktur organisasi dan sistem kinerja. (Lebas, 1995) juga menyatakan bahwa pengukuran kinerja seharusnya didasarkan kepada pengukuran kunci keberhasilan, deteksi deviasi, perbandingan pencapaian di masa lalu, pengukuran output, pengukuran input dan pengukuran outcome. Beberapa negara berkembang seperti India, Nepal, Pakistan dan Sri Lanka telah mengembangkan sistem pengukuran kinerja dengan memperkenalkan indikator pertumbuhan, efisiensi, kompetisi, kewirausahaan dan *value for money* dan orientasi pelanggan (Haque, 2001). Bahkan di Singapura, pengukuran kinerja tidak hanya berorientasi kepada kuantitas output namun juga melakukan penilaian terhadap kualitas output serta mengurangi jumlah indikator berorientasi kuantitas yang tidak relevan (David S. Jones, 2000).

Penyerapan anggaran dinilai sebagai representasi kinerja di instansi pemerintah, dimana kecenderungan yang terjadi selama ini ialah penyerapan anggaran terjadi pada akhir tahun anggaran. Seperti misalnya penelitian (Miliasih, 2012) serta (Rahayu, 2010) mengidentifikasi bahwa penyebab utama keterlambatan penyerapan anggaran belanja terletak pada permasalahan internal satuan kerja. Secara umum, penelitian mengenai penyebab rendahnya penyerapan anggaran telah banyak dilakukan seperti misalnya oleh (D.Elimanafe, 2015), (Anak Agung Ayu Nitya Saridewi, Piers Andreas Noak, 2015), dan (Arif, 2015). (D.Elimanafe, 2015) menyimpulkan bahwa faktor terbesar yang mempengaruhi penyerapan anggaran belanja modal di Kabupaten Rote Ndao adalah faktor geografis dan kondisi alam. Berbeda dengan penelitian (Arif, 2015) dengan obyek di 3 Kabupaten Provinsi Riau tahun 2011, dapat disimpulkan bahwa kondisi internal pengelolaan keuangan daerah dan pemerintahan daerah yang berbeda mempunyai faktor penyebab yang berbeda pula mengenai minimnya penyerapan APBD. Namun demikian, terdapat beberapa faktor yang hampir sama antara daerah satu dengan daerah lainnya, yaitu faktor regulasi, faktor politik, faktor tender/lelang dan faktor komitmen organisasi.

Penelitian-penelitian yang dilakukan di negara lain dalam konteks yang sama pada prinsipnya menyimpulkan bahwa performa keberhasilan penyerapan anggaran dalam suatu lembaga dan/atau proyek dipengaruhi oleh gaya kepemimpinan, keterpaduan tim, latar belakang budaya, model komunikasi, dan partisipasi penganggaran. Seperti misalnya (Keller, 1986)(Keller, 1992) menyimpulkan bahwa kepemimpinan transformasional dan keterpaduan tim dalam bekerja merupakan prediktor utama dalam akurasi ketepatan waktu realisasi anggaran sekaligus tingginya performa proyek. Selain itu, (Maria A. Leach-López, William W. Stammerjohan, 2007) berhasil membangun sebuah path model yang bermuara pada suatu kesimpulan yang menyimpulkan bahwa latar belakang budaya dan model komunikasi di dalam suatu lembaga merupakan suatu variabel dalam tingginya kinerja keuangan suatu organisasi. Berdasarkan teori pencapaian tujuan (goal setting theory), (Vincent K. Chong & Kar Ming Chong, 2002) berhasil memodelkan suatu formula dimana proses budgeting yang partisipatif mampu

menjadi pemicu utama pelaksana yang berkomitmen tinggi melalui efek informasi untuk meningkatkan kinerja berdasarkan kesesuaian informasi dengan tugas, pokok serta fungsi. Lebih jauh, proses budgeting yang partisipatif ini juga memiliki peran untuk meningkatkan motivasi yang pada akhirnya akan meningkatkan kinerja keuangan. Bahkan secara bersama-sama, anggaran yang bersifat partisipatif dan komitmen organisasi yang tinggi secara bersama-sama mampu meningkatkan kinerja secara keseluruhan (H. Nouri, 1998).

Penelitian-penelitian terhadap pola penyerapan anggaran telah banyak dilakukan untuk membahas sebab dari keterlambatan penyerapan anggaran. Namun demikian, masih sangat jarang penelitian yang dilakukan untuk membahas permasalahan-permasalahan yang terjadi atas tingginya penyerapan anggaran. (Sugiharto dan Sitinjak, 2006) mendefinisikan validitas terkait dengan sejauh mana suatu variabel mengukur aspek yang seharusnya diukur. Sehingga poin yang menjadi titik fokus dalam keakuratan penelitian adalah tentang apakah anggaran yang diukur sesuai dengan praktik pengelolaan anggaran yang tepat sesuai aturan Undang-Undang Republik Indonesia. Sedangkan realibilitas untuk penelitian ini, apakah pengukuran kinerja organisasi dapat diandalkan dan menghasilkan hasil yang serupa jika diulang pada waktu yang berbeda. Kedua uji ini tentunya dapat membantu memecahkan solusi bagaimana sistem yang tepat dalam merencanakan sebuah anggaran di BPN Lampung dapat dijalankan dengan efisien. Memang selama ini belum ada ukuran mengenai penyerapan anggaran yang tergolong tinggi ataupun rendah, akan tetapi disebutkan dalam pakta integritas beberapa pemerintah daerah akan tercatat mengalami keminiman serapan anggaran apabila sampai dengan akhir tahun tidak mampu merealisasikan 90% dari total APBD (Arif, 2015). Belum banyaknya bukti empiris mengenai hubungan antara penyerapan anggaran dengan pencapaian kinerja seperti yang disampaikan oleh (Ali Rozai & Subagiyo, 2015), merupakan suatu hal yang menarik untuk dilakukan penelitian lebih lanjut. Seperti halnya fenomena yang terjadi di Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung (Kanwil BPN Provinsi Lampung) dalam hal penyerapan anggaran berbeda dengan yang temuan-temuan seperti yang ada pada

penelitian yang telah dilakukan mengenai minimnya ataupun keterlambatan penyerapan anggaran. Pemerintah Provinsi Lampung memperoleh piagam penghargaan sebagai realisasi belanja APBD provinsi se-indonesia tahun 2022 dengan penyerapan anggaran tertinggi yaitu sebesar 97.25%. Piagam Penghargaan tersebut diberikan dalam rapat pimpinan Kementerian dalam negeri republik indonesia tahun 2023. Persoalan dalam mekanisme pembayaran juga menjadi faktor yang menyebabkan terlambatnya penyerapan anggaran. Mekanisme pembayaran yang disebabkan oleh perencanaan kas yang tidak akurat, sehingga satuan kerja tidak memiliki pedoman yang tepat kapan anggaran akan direalisasikan (Seftianova & Adam, 2014). Hal tersebut menjelaskan bahwa Kanwil BPN provinsi Lampung memiliki perencanaan kaa yang akurat sehingga penyerapan anggaran bisa dimaksimalkan.

Prestasi yang diraih ini merupakan sebuah kemajuan yang dapat dicapai dan patut untuk diberikan apresiasi mengingat penyerapan anggaran pada tahun-tahun sebelumnya mengalami keterlambatan. Keberhasilan penyerapan anggaran yang dilakukan tidak terlepas dari perwujudan goal setting theory (teori penetapan tujuan) dimana tujuan organisasi akan dapat memberikan motivasi bagi pegawai dalam mencapai hasil yang telah ditetapkan. Persentase capaian penyerapan anggaran di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional tahun anggaran 2022 disajikan dalam tabel 1.1 Berikut.

Tabel 1.1 Realisasi Daerah Tertinggi pada kementerian agraria dan tata ruang / badan pertanahan nasional tahun anggaran 2022

No	Provinsi	Realisasi %
1	Lampung	97.25
2	Kepulauan Riau	96.68
3	Jawa Barat	96.44
4	Kalimantan Barat	95.54
5	Jawa Tengah	95.14

Sumber : Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN (2022)

Selama tiga tahun terakhir, tentang capaian serapan vs output outcome tercapai oleh Kantor Wilayah BPN Provinsi Lampung mengalami peningkatan. Pada tabel 1.2 digambarkan peningkatan capaian penyerapan anggaran yang dilakukan. Pada tahun 2019 kinerja yang dicapai oleh Kanwil BPN Provinsi Lampung sebesar 89.25% dari total anggaran yang disediakan. Kemudian pada tahun 2020, kinerja yang dicapai mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya yaitu sebesar 90.67%. Dengan pencapaian kinerja sebesar 90.67%, Kanwil BPN Provinsi Lampung mendapatkan penghargaan terbaik ke 1 sebagai realisasi belanja APBD provinsi se-indonesia tahun 2022 atas penyerapan anggaran yang dilakukan. Hal ini menunjukkan capaian penyerapan yang dilakukan oleh kantor wilayah BPN Provinsi Lampung. Pada tahun 2021 kanwil BPN Provinsi Lampung merealisasikan anggaran sebanyak Rp 105.089.430.343 dari keseluruhan pagu anggaran sebesar Rp 113.150.386.000, atau sebesar 93.82%.

Tabel 1.2 Penyerapan Anggaran Kanwil BPN Provinsi Lampung

Tahun 2019-2021			
Tahun	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Persentase %
2019	88,686,263,000	78,615,852,915	89.25
2020	90,328,717,000	81,202,137,170	90.67
2021	113.150.386.000,	105.089.430.343	93.82

Sumber : Data Diolah dari subbagian perencanaan dan keuangan (2020, 2021, 2022)

Pembiayaan pelaksanaan anggaran yang dilakukan oleh Kanwil BPN Provinsi Lampung dilakukan melalui Rupiah Murni (RM) dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Kegiatan yang pembiayaannya dengan RM dapat dilaksanakan pada awal tahun anggaran setelah DIPA disyahkan. Akan tetapi pembiayaan kegiatan yang berasal dari PNBP belum dapat dilaksanakan di awal tahun dikarenakan penerimaan negara dilakukan secara terpusat sehingga harus menunggu alokasi anggaran dari kantor pusat.

Gap dari data di atas adalah penurunan capaian penyerapan anggaran pada tahun 2021, meskipun masih tinggi sebesar 93.82%, dibandingkan dengan tahun

sebelumnya yang mencapai 90.67%. Meskipun demikian, informasi tentang langkah-langkah atau rencana perbaikan untuk mengatasi penurunan tersebut tidak disertakan dalam konteks yang diberikan.

Penelitian ini memilih pendekatan kualitatif dengan menggunakan strategi case study. Metode ini dipilih untuk mengetahui gap permasalahan – permasalahan yang ada akibat penyerapan anggaran pemerintahan melalui beberapa kasus yang terjadi secara riil di lapangan atau lingkungan masyarakat dimana belum banyak dibahas oleh penelitian terdahulu secara lebih spesifik dengan memunculkan beberapa studi kasus. Fokus penelitian kualitatif ini terletak pada bagaimana dampak yang terjadi terhadap penyerapan anggaran di Kantor Badan Pertanahan Nasional wilayah Lampung dengan melihat variabel seperti tata laksana penyerapan anggaran, penyebab tingginya penyerapan anggaran, output, kinerja, sistem evaluasi dan tipologi penyerapan anggaran, permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan anggaran, pelaksanaan anggaran dalam kerangka manajemen strategis serta implikasi penyerapan anggaran, output dan kinerja. Dengan demikian hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi praktis dan kebijakan kepada Kantor Wilayah BPN Provinsi Lampung dalam upaya mengoptimalkan antara penyerapan anggaran dengan output yang dihasilkan Berdasarkan fenomena diatas, peneliti melakukan penelitian dengan judul “Analisis Pengelolaan Anggaran Dan Implikasinya Terhadap Kinerja Organisasi Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung”.

1.2 Perumusan masalah

Penyerapan anggaran tahun 2022 yang dilakukan oleh Kanwil BPN Provinsi Lampung sebesar 97.25% dapat dikatakan tinggi jika dibandingkan dengan Kantor Wilayah BPN Provinsi lain di lingkungan Kementerian ATR/BPN. Hal tersebut sesuai dengan penelitian (Rahayu, 2010) mengidentifikasi bahwa penyebab utama keterlambatan penyerapan anggaran belanja terletak pada permasalahan internal satuan kerja. Secara umum, penelitian mengenai penyebab rendahnya penyerapan anggaran telah banyak dilakukan Walaupun memang belum jelas tolok ukur yang

mengatakan apakah termasuk kategori tinggi atau rendah. Harapan dari capaian penyerapan anggaran ini tentunya kinerja output juga dapat dicapai sebanyak 100%. Akan tetapi, kinerja capaian anggaran yang tinggi tersebut ternyata belum mencerminkan kinerja output yang baik. Sebagai contoh, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) laporan hasil pemeriksaan pemerintah daerah menemukan tidak seimbang penyerapan anggaran dan output fisik dari akun pendapatan diterima dimuka senilai Rp.3.013.161.993 dimana masih terdapat 2.822 tunggakan pekerjaan berupa belum terselesaikannya proses administrasi pendaftaran/pencatatan bidang tanah. Dalam hal ini, akun pendapatan diterima dimuka ini merupakan hutang BPN (*unearned revenue*) serta berkaitan dengan output yang dihasilkan oleh BPN Provinsi Lampung dalam hal pelayanan pertanahan berupa sertipikat, maka dapat disimpulkan masih adanya permasalahan kinerja apabila dibandingkan dengan tingginya serapan/ capaian anggaran. Sebagai contoh permasalahan lain tingginya serapan/ capaian anggaran, berdasarkan wawancara awal, salah satu informan mengatakan bahwa memang telah dilakukan pencairan terhadap akun kegiatan dari suatu pekerjaan tertentu namun demikian output pekerjaan belum disampaikan sampai melewati ketentuan di dalam Surat Tugas. Selain itu, output pekerjaan juga tidak dilakukan kontrol kualitas secara komprehensif yang menyebabkan harapan output sesungguhnya tidak tercapai. Kontrol kualitas masih dilakukan sebagai formalitas yang terkadang mengesampingkan Petunjuk Teknis Kegiatan. Hal ini disebabkan karena kegiatan terkadang memiliki tenggat waktu penyelesaian yang tidak logis tanpa didukung oleh sumber daya yang memadai. Terlepas dari hal tersebut, secara obyektif dapat dikatakan bahwa masih ada ketimpangan antara capaian penyerapan anggaran dengan kinerja fisik baik dari segi kuantitas maupun dari segi kualitas.

Permasalahan lain yang dihadapi terhadap fenomena tingginya capaian anggaran adalah sistem pelaporan. Pertama, laporan kinerja yang biasa digunakan untuk menilai akuntabilitas organisasi sektor publik berupa Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang disusun setiap tahun oleh unit kerja eselon II dan berisi gambaran capaian kinerja yang telah dicapai oleh unit kerja

tersebut hanya memperhitungkan output yang dihasilkan secara kuantitas, akan tetapi penilaian terhadap kualitas output belum dilakukan. Sebagai contoh negara Singapura, dimana pengukuran kinerja tidak hanya berorientasi kepada kuantitas output namun juga melakukan penilaian terhadap kualitas output serta mengurangi jumlah indikator yang tidak relevan (David S. Jones, 2000). Selain itu, berdasarkan pengamatan awal, sistem evaluasi kinerja yang dirilis oleh Kementerian Keuangan (SMART) masih belum mencukupi karena kontrol hanya dilakukan berdasarkan formulir yang disebar kepada setiap satuan kerja. Sehingga, formulir tersebut dapat diisi oleh pejabat yang berwenang secara subjektif dan seakan-akan kinerja yang telah dicapai sudah tinggi yang pada kenyataannya mungkin bertentangan dengan kondisi sebenarnya.

Dari permasalahan yang disampaikan di atas dapat dirumuskan permasalahan utama dari tingginya penyerapan anggaran yaitu bahwa penyerapan/capaian keuangan yang tinggi tidak selalu mencerminkan kinerja output fisik yang baik, dilihat dari sudut pandang kuantitas dan kualitas. Belum banyaknya bukti empiris hubungan antara penyerapan anggaran yang tinggi dan pencapaian kinerja pada organisasi sektor publik, maka menarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai penyerapan anggaran yang dilakukan oleh Kanwil BPN Provinsi Lampung dengan output yang dihasilkan. Berdasarkan pemaparan di atas secara khusus dapat disimpulkan tentang penyerapan anggaran sebagai berikut :

- 1) Tingkat serapan/ capaian anggaran yang tinggi belum tentu diikuti dengan kinerja fisik/ output yang tinggi.
- 2) Kualitas output pada instansi dengan capaian serapan anggaran yang tinggi belum tentu baik secara kualitas.
- 3) Sistem pelaporan kinerja hanya mengandalkan jumlah capaian yang tinggi tanpa memperhitungkan/ mempertimbangkan bukti/ evidence terkait dengan capaian fisik.

1.3 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan rumusan permasalahan di atas, pertanyaan penelitian ini akan berfokus pada hal-hal tata laksana penyerapan anggaran, penyebab tingginya penyerapan anggaran, output, kinerja, sistem evaluasi dan tipologi penyerapan anggaran, permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan anggaran, pelaksanaan anggaran dalam kerangka manajemen strategis serta implikasi penyerapan anggaran, output dan kinerja sehingga yang menjadi pertanyaan penelitian adalah sebagai berikut :

- 1) Bagaimana tata laksana penyerapan anggaran di lingkungan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung?
- 2) Apa faktor penyebab Kanwil BPN Provinsi Lampung dapat melakukan penyerapan anggaran dengan tingkat penyerapan anggaran yang tinggi?
- 3) Bagaimana output, kinerja, sistem evaluasi dan tipologi penyerapan anggaran Kanwil BPN Provinsi Lampung?
- 4) Apa permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan anggaran di Kanwil BPN Provinsi Lampung?
- 5) Bagaimana pelaksanaan anggaran di Kanwil BPN Provinsi Lampung dalam kerangka manajemen strategis?
- 6) Bagaimana sinkronisasi anggaran dan dampak outcome yang merepresentasikan kinerja Kanwil BPN Provinsi Lampung?

1.4 Tujuan Penelitian

Kecenderungan penyerapan yang tinggi pada setiap akhir tahun anggaran merupakan salah satu cerminan dari buruknya kinerja pemerintah dan/atau organisasi sektor publik. Hal ini cenderung diikuti dengan rendahnya capaian kinerja secara umum yang berdampak kepada terjadinya delay dalam penyediaan layanan umum, pembangunan infrastruktur, kegagalan penciptaan lapangan pekerjaan dan bermuara kepada kegagalan pemerintah dalam mengurangi angka kemiskinan. Hal ini tentunya pada akhirnya merupakan indikator kegagalan

pemerintah dalam meningkatkan dan mempertahankan kesejahteraan masyarakat karena postur APBN pemerintah pusat secara signifikan mempengaruhi fungsi permintaan dalam ekonomi makro yang sering digambarkan dalam susunan tabel input-output. Di Indonesia, APBN mempengaruhi pengeluaran sektor riil dimana permintaan tersebut pada akhirnya akan mempengaruhi gambaran output secara nasional yang sering tergambarkan dalam komposisi dan pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

Penelitian-penelitian yang dilakukan baik secara kualitatif maupun secara kuantitatif cenderung dilakukan untuk mengeksplorasi faktor-faktor yang menyebabkan keterlambatan penyerapan anggaran. Namun demikian, hasil penelitian tersebut lebih cenderung menjadi literatur semata karena masih banyak kementerian/ lembaga maupun pemerintah daerah yang masih memiliki capaian sangat rendah di awal tahun anggaran. Salah satu permasalahan yang timbul dari pola ini adalah kecenderungan untuk menyajikan laporan keuangan yang tidak akuntabel yang merupakan cerminan dari ketidakwajaran pengelolaan keuangan. Hal ini dapat dipahami karena pekerjaan yang dilakukan di akhir tahun anggaran cenderung tergesa-gesa hanya untuk mengejar capaian penyerapan anggaran maksimal tanpa memperhatikan ketercapaian output yang optimal yang pada akhirnya akan menurunkan kualitas outcome dari suatu kegiatan.

Penelitian yang dilakukan didasari pada suatu fenomena kecenderungan penelitian terdahulu yang hanya meneliti objek yang memiliki serapan rendah. Berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti, dimana tingginya serapan anggaran yang terjadi membuat peneliti tertarik untuk dapat melakukan penelitian. Dengan menggunakan panduan variabel pada penelitian keterlambatan anggaran, peneliti akan mengeksplorasi prestasi penyerapan anggaran yang dilakukan, menemukenali faktor-faktor penyebab tingginya penyerapan anggaran dan membahas mengenai output, kinerja, sistem evaluasi dan tipologi penyerapan anggaran yang dilakukan, membahas permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan anggaran di Kanwil Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung, membahas pelaksanaan anggaran dalam kerangka manajemen strategis, dan

membahas implikasi penyerapan anggaran, output dan kinerja Kanwil Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung.

Pada hakekatnya salah satu alasan suatu penelitian adalah untuk menjawab fenomena-fenomena yang terjadi pada suatu situasi atau lokasi tertentu. Fenomena yang terjadi di Kanwil Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung adanya tingginya serapan anggaran yang dilakukan dan tidak menumpuk di akhir tahun anggaran. Berdasarkan pertanyaan penelitian yang dikemukakan, maka tujuan penelitian ini adalah

- a) Untuk mengeksplorasi pelaksanaan penyerapan anggaran yang dilakukan di lingkungan Kantor Wilayah BPN Provinsi Lampung.
- b) Untuk mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan penyerapan anggaran sehingga dapat melakukan penyerapan anggaran yang tinggi.
- c) Untuk mengetahui output fisik yang dicapai, kinerja, sistem evaluasi yang digunakan dan selanjutnya dapat dikategorikan dalam tipologi penyerapan anggaran dan capaian output.
- d) Untuk mengeksplorasi permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan anggaran yang dilakukan oleh Kanwil BPN Provinsi Lampung.
- e) Untuk mengetahui kesesuaian pelaksanaan anggaran yang dilakukan dalam kerangka manajemen strategis.
- f) Bagaimana sinkronisasi anggaran dan berapa outcome yang merepresentasikan kinerja Kanwil BPN Provinsi Lampung?

1.5 Manfaat Penelitian

1.5.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi secara teoritis dalam menambah khazanah pemahaman tentang Akuntansi Sektor Publik dalam kaitannya dengan penyerapan anggaran. Tingginya penyerapan anggaran yang menjadi obyek kajian dalam penelitian diharapkan akan memperkaya keilmuan dalam akuntansi sektor publik, khususnya berupa bertambahnya pengetahuan

mengenai penyebab tingginya penyerapan anggaran yang tidak terkonsentrasi di akhir tahun. Selain itu, penelitian ini akan memberikan gambaran mengenai permasalahan-permasalahan yang mungkin terjadi pada organisasi publik dengan tingkat penyerapan anggaran yang tinggi. Permasalahan tersebut perlu dikaji sebagai upaya untuk meningkatkan akuntabilitas dari pelaksanaan kegiatan/program.

1.5.2 Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini, secara praktis dapat memberikan kontribusi bagi Kanwil Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung dalam mempertahankan tingginya penyerapan anggaran dimana penumpukan penyerapan anggaran tidak terjadi di akhir tahun sekaligus memberikan gambaran dalam upaya meningkatkan akuntabilitas dari dampak tingginya penyerapan anggaran. Selain itu sebagai input bahwa kinerja penyerapan anggaran harus merepresentasikan kinerja secara fisik, sehingga output yang diharapkan dalam suatu kegiatan benar-benar berhasil dan berdaya guna. Dengan demikian anggaran yang telah digunakan benar-benar memberikan nilai tambah terhadap pelayanan publik dalam rangka meningkatkan dan/atau mempertahankan pertumbuhan ekonomi.

1.5.3 Manfaat Kebijakan

Hasil temuan dalam penelitian ini, dapat digunakan oleh instansi di Kanwil Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung sebagai strategi dalam pelaksanaan penyerapan anggaran. Selain itu, penelitian ini dapat dijadikan sebagai "*best practice*" bagi instansi lain untuk dapat diaplikasikan dalam rangka percepatan penyerapan anggaran sebagai langkah awal peningkatan kinerja. Selain itu penelitian ini akan berguna dalam proses evaluasi atas praktek perencanaan kegiatan melalui penilaian atas efektivitas dan/atau efisiensi besaran satuan biaya dan tahapan proses kegiatan. Permasalahan yang mungkin timbul di dalam tingkat penyerapan anggaran yang tinggi juga dapat dijadikan sebagai bahan pembelajaran, terutama dalam perumusan metode dalam evaluasi kinerja dan penilaian akuntabilitas.